

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Demikian Renja Kerja tahun 2024 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 199303 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	24
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	81
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	84
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	97
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	98
2.7. Penghargaan.....	98
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	100
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	100
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	107
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	111
4.1 Program dan Kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ...	111
BAB IV PENUTUP	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan
Pembangunan 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Triwulan I Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	25
Tabel 2.4	Indeks Rasa Aman dari Tahun 2017-2023 TW I	29
Tabel 2.5	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	30
Tabel 2.6	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	32
Tabel 2.7	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup sampai dengan Tahun 2023 TW I	33
Tabel 2.8	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	34
Tabel 2.9	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2018-Tahun 2023 TW I	35
Tabel 2.10	Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	36
Tabel 2.11	Rasio Jumlah Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	39
Tabel 2.12	Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Tahun 2023	40
Tabel 2.13	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	41
Tabel 2.14	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d 2023 TW I	42
Tabel 2.15	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	43
Tabel 2.16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 TW I	44
Tabel 2.17	Tabel Data Pelanggaran Perda Terkait K4 per kecamatan Tahun 2023	45
Tabel 2.18	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	46
Tabel 2.19	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023 s/d TW I	47
Tabel 2.20	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	53
Tabel 2.21	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	53
Tabel 2.22	Faktor Pendorong,Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	54
Tabel 2.23	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	56
Tabel 2.24	Data Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I	57

Tabel 2.25	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	59
Tabel 2.26	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	60
Tabel 2.27	Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023 TW I	61
Tabel 2.28	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 Liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	64
Tabel 2.29	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2023	65
Tabel 2.30	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	67
Tabel 2.31	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	68
Tabel 2.32	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah Pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 TW I	70
Tabel 2.33	Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d Tahun 2022 TW IV	71
Tabel 2.34	Tabel Daftar Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran Tahun 2023 TW I	72
Tabel 2.35	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	86
Tabel 2.36	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (hasil musrenbang RKPD Kecamatan)	97
Tabel 2.37	Daftar inovasi perangkat daerah 2019-2021	98
Tabel 2.38	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	98
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024	108
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024	112
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024	116

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

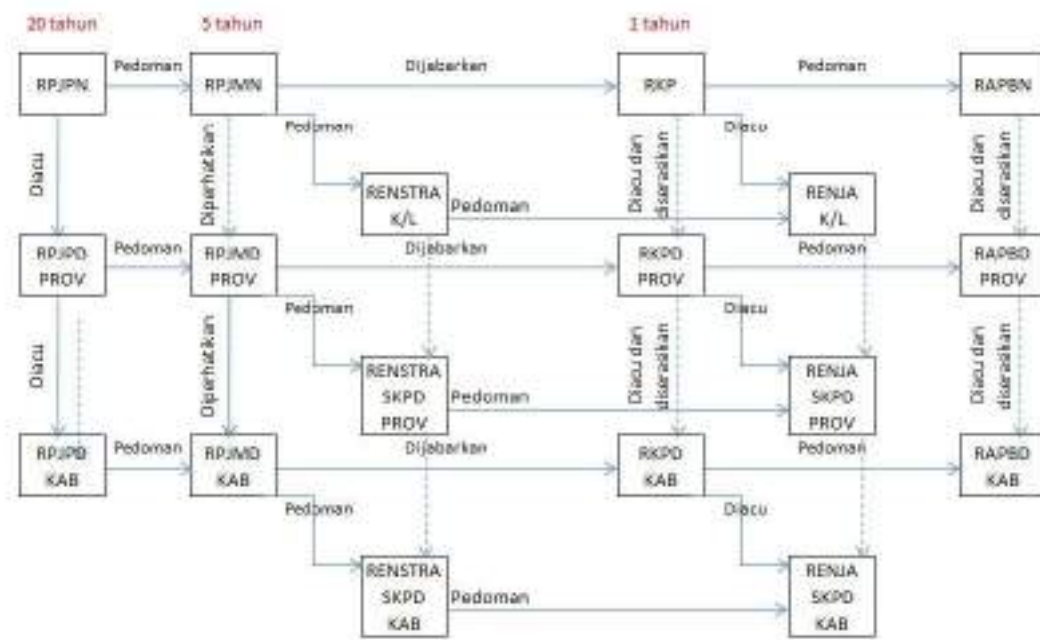
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;



- 2) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu berdasarkan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh (Perangkat Daerah). Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi

birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Tahun 2022

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Capaian s/d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$\frac{1}{6}$	$17=(8+21)$	18	18	19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.041.656.00 0	5.302.199.979		5.089.580.020		95,99					
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	70	-			14	5.041.656.00 0	5.302.199.979	14	5.089.580.020	100	99,99					
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								127.999.400	302.999.140		285.687.550		94,29					
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya							6	127.999.400	127.999.400	6	125.061.050	100	97,70					
b	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							12	0	175.000.000	12	160.626.500	100	91,79					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								168.383.150	85.733.150		811.794.150		95,41					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	60				12	6.999.950	6.999.950	12	6.989.000	100	99,84				
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	60				12	94.400.000	18.940.000	12	18.240.250	100	96,31				
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	60				12	6.999.700.	9.793.900	12	7.162.000	100	73				
d.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	60				12	5.000.000	3.000.000	12	2.892.000	100	96				
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	60				12	54.983.500	46.999.300	12	46.510.400	100	98,96				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								259.223.800	257.224.000		232.849.255		90,52				
a	Penyedia Jasa Surat Menyurat							12	1.999.800	0	12	0	100	0,00				
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60				12	70.000.000	70.000.000	12	61.716.364	100	88,17				
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tersedianya Lembur serta Gaji SS dan Tenaga Pendukung Administrasi 1 orang 12 bulan	bulan	60				12	187.224.000	187.224.000	12	171.130.891	100	91,40				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah								129.997.500	138.010.000		137.480.740	100	99,97				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	bulan	60				12	50.000.000	72.510.000	12	72.489.740	100	99,97					
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12	79.997.500	65.500.000	12	65.486.131	100	99,98					
	Total Program								5.727.259.850	6.086.166.269		5.827.886.846		90,52					
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								920.000.000	1.182.000.000		1.086.922.320		91,96					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan terbayarnya Gaji SS Banpol sejumlah 30 orang	bulan	60				12	20.000.000	92.000.00	12	88,195.320	100	95,86				
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penertiban PKL, Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	bulan	60		12		12	850.000.000	976.504.000	12	893.273.000	100	91,48				
c.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Korpsik dan Penampilan dalam Upacara Kenegaraan	bulan	60		12		12	50.000.000	113.496.000	12	105.454.000	100	92,91				
Total Program									920.000.000	1.182.000.000		1.086.922.320		91,96				
3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.652.756.000	1.822.690.800		1.810.151.708		99,31				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercukupinya gaji ss damkar dan perlengkapannya	bulan	60		12		12	77.008.600	148.708.600	12	148.237.293	100	99,68				
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Tertanganinya kebakaran,terlanya operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah,tanah longsor,penanga	bulan	60		12		2	293.383.200	106.160.000	12	105.841.265	100	99,70				
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri							12	201.843.400	560.682.200	12	553.353.150	100	98,69				
d.	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran							12	1.080.520.800	1.007.140.000	12	1.002.720.000	100	99,56				
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								99.479.000	165.700.000		163.672.800		98,78				
a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	bulan	60		12		12	99.479.000	165.700.000	12	163.672.800	100	98,88				
	Total Program								1.752.235.000	1.988.390.800		1.973.824.508		99,27				

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2022		Target 2023			Realisasi 2023 Triwulan I		Capaian 2023		Realisasi s/d 2023		Capaian s/d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.340.990.412	4.858.599.266		1.069.164.921		22,01					
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					14	5.340.990.412	4.858.599.266	3	1.069.164.921	21,43	22,01					
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								346.015.000	409.375.800		256.460.100		62,65					
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Satgas Damkar beserta kelengkapannya						6	146.015.000	94.185.000	3	872.000	50,00	0,93					
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi barang kena cukai						12	200.000.000	315.190.800	3	255.587.300	25,00	81,09					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								179.000.000	178.857.000		27.390.500		15,31					
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan					12	10.000000	10.000.000	3	0	25,00	0,00					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan				12	55.000.000	55.000.000	3	0	25,00	0,00					
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan kantor	bulan				12	25.000.000	25.000.000	3	2.898.500	25,00	11,59					
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan				12	10.000.000	10.000.000	3	1.356.400	25,00	13,56					
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya bahan minuman	bulan				12	39.000.000	39.000.000	3	6.514.000	25,00	16,70					
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan				12	40.000.000	39.857.000	3	16.621.600	25,00	41,70					
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							560.000.000	530.000.000		489.355.800		92,33					
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5	560.000.000	530.000.000	3	489.355.800	60,00	92,33					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							251.674.000	251.674.000		58.197.337		23,12					
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan				12	70.000.000	70.000.000	3	16.991.638	25,00	24,27					
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan				12	9.500.000	9.500.000	3	0	25,00	0,00					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

c	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya honor tenaga keamanan, kebersihan, jasa spanduk/karangan bunga, iklan ucapan selamat	bulan					12	172.174.000	172.174.000	3	41.205.699	25,00	23,93				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195.000.000	316.000.000		17.399.692		5,51				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dinas	bulan					12	60.000.000	60.000.000	3	2.031.750	25,00	3,39				
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya BBM dan pelumas serta Kendaraan Dinas serta biaya pajak kendaraan dinas	bulan					12	50.000.000	50.000.000	3	15.367.942	25,00	30,74				
c	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	bulan					12	5.000.000	5.000.000	3	0	25,00	0,00				
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan					12	50.000.000	25.000.000	3	0	25,00	0,00				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan					12	150.000.000	176.000.000	3	0	25,00	0,00				
Total Program									6.872.679.412	6.544.506.066		1.917.968.350						
2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								926.990.000	913.990.000		198.325.398		21,70				
a	pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, pengamanan, dan Pengawasan pejabat negara dan daerah	bulan					12	92.000.000	79.000.000	3	10.140.000	25,00	12,84				
b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terbayarnya honor SS Banpol, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan terselenggaranya pelaksanaan PILKADES	bulan					12	834.990.000	834.990.000	3	188.185.398	25,00	22,54				
2	Penegakan Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								0	734.809.200		0		0,00				
a	Penanganan Atas Pelanggaran	Tertanganinya Pelanggaran	bulan					12	0	734.809.200	3	0	25,00	0,00				

	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
	Total Program							926.990.000	1.648.799.200		198.325.398		12,03						
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.156.620.000	1.201.037.900		310.259.298		25,83						
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time Damkar dan meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	bulan					12	111.582.100	156.000.000	3	47.825.436	25,00	30,66					
b	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlindunginya keselamatan petugas Damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	bulan					12	12.417.900	12.417.900	3	11.520.000	25,00	92,77					
c	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran	Tercukupinya honor SS Satgas Damkar, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	bulan					12	1.032.620.000	1.032.620.000	3	250.913.862	25,00	24,30					
	Total Program							1.156.620.000	1.201.037.900		310.259.298		25,83						

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - k. Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - l. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - m. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 - n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - p. pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan

- q. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - r. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - s. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - t. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri
 - u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
 - v. Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran
 - w. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah tidak ada

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangat memuaskan** yaitu dengan nilai **90,88%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja : 95,94 % kategori Baik

2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian Kinerja : 85,88 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Rasa Aman	angka	3,15	4,41	4,42	4,43	4,44	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55	100	TT
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
3	Rasio Linmas per RT	Rasio	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,38	1,38	1,42	1,42	1,42	87,84	UK
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	n.a	n.a	100	100	100	0	0	100	100	100	100	TT
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,81	61,00	60,64	60,64	60,64	60,64	60,42	99,38	UK
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	42,86	55,56	76,67	60,00	62,50	89,54	UK
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	40	41	42	43	44	n.a	n.a	310	468	137	100	TT
8	Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	40	41	42	43	44	33,96	35,19	32,14	80,00	96,36	100	TT
9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	0	0	47,73	43,75	42,86	42,86	UK

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Indek Rasa Aman.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Kabupaten Temanggung yang tidak menyukai konflik, kondisi geografis sebagai sebuah wilayah administratif di pegunungan yang kecil.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinamika kota kecil di pegunungan menjadi salah satu destinasi persembunyian yang aman bagi para teroris.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diberikan pelatihan teknis dan alokasi anggaran anggaran penghitungan dari UP5AD kepada OPD.
 - b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Satpol PP yang melaksanakan Penegakan Perda dengan pendekatan non yustisial yang humanis dan persuasive.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum berfungsinya PPNS secara maximal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis.
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tidak terdapat dampak dari pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Daerah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan pembinaan pada pelanggar Perda dan Perkada

- d. Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sarana dan prasarana yang terbatas serta tempat kejadian yang susah untuk dijangkau
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan .
 - e. Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya alokasi anggaran diklat /bintek yang tersedia di BKPSDM.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Penyedia/instansi yang menyelenggarakan diklat sangat terbatas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengikuti kegiatan - kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
2. Capaian indikator dengan status Upaya Keras ada 4 terdiri dari:
- a. Rasio Linmas per RT
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah persebaran Linmas di tiap desa/kelurahantidak merata.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan Linmas ke desa/kelurahan.
 - b. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah telah ditentukan Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jumlah pos yang tidak seimbang dengan luas wilayah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan pos kebakaran.
 - a. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat, lokasi mudah dijangkau, ketersediaan sumber air mudah didapatkan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah TKP merupakan medan yang sulit dijangkau, informasi/laporan kejadian kebakaran terlambat, sumber air tidak mudah dijangkau/sulit atau bahkan tidak ada keberadaannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran
- d. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi kejadian kebakaran tidak terlambat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jarak dan kondisi geografis yang mendukung
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan pos kebakaran.

Realisasi Capaian kinerja tahun 2023 untuk persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masih belum mencapai target yaitu masih sebesar 42,86%, untuk itu perlu upaya keras untuk mencapai target dengan berbagai rencana aksi yang meliputi :

- a. Pembangunan Pos Damkar mengacu kepada Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran/RISK di (Ngadirejo, Parakan dan Tembarak)
- b. Pembangunan groundtang/ penampungan air dan sumber air di Pos Candiroto, Pos Temanggung dan Pos Maron
- c. Penambahan personil damkar mengacu ke Analisis Beban Kerja
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana Damkar sesuai Permendagri No.122 tahun 2018 (kendaraan Damkar,APD personil damkar, Sarpras pemadam Damkar)

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok **Bidang Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dan Data Pokok Bidang

Bidang Pemadaman Kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang **Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2022 adalah 4,55 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

Tabel 2.4

Indeks Rasa Aman dari Tahun 2017-2023 TW I

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2023 TW I

Pada tahun 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, baru di tahun 2019 mulai dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Indeks Rasa Aman	1. Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi; 2. Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian. 3. Media social membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat	.	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 TW I

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	275	462	1903	1880	2759	502
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	315	462	1903	1880	2759	502
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT. penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2023 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda. Meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100 %). Selain pelanggaran perda k4 / reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak- anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah. pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP juga berhasil menutup aktifitas galian c di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso

Temanggung. Tahun 2021 situasi di Indonesia masih mengalami pandemi covid 19 termasuk juga di Kabupaten Temanggung. Dampak adanya pandemi covid 19 sangat terasa ,untuk di Satpol PP anggaran giat penertiban mengalami banyak penurunan karena di alihkan untuk giat penanganan covid 19 , akan tetapi dengan semua keterbatasan itu tidak menghalangi Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam berkarya menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2023 TW I dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Sampai dengan Tahun 2023 TW I

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	PGOT	No. 3 tahun 2013	Wilayah Kabupaten Temanggung (20 Kec)	4
2	IMB	No. 15 tahun 2011		-
3	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		-
4.	Reklame	No. 33 tahun 2011		434
5.	PKL	No. 3 tahun 2019		64
6.	Protokol Kesehatan	No. 45 tahun 2020 (Perbup)		-
JUMLAH				502

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame. serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.8
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda 2. Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas. 3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Terbatasnya dukungan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis 3. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 4. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 5. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

3. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas Satpol PP adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Rasio Petugas Satpol PP

Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s/d Tahun 2023 TW I

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Jumlah Penduduk	Orang	780.148	791.264	795.556	795.556	800.429	800,429
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	114	104	86	66	65	65
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,4	(1,33)	1,08	0,82	0,81	0,81
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	36	43	64	84	85	85

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 65 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiun, dengan jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 85 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, Satpol PP Kecamatan yg menjadi staf Kecamatan, dan pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

Tabel 2.10
 DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	Drs. EDY CAHYADI, M.M	19730619 199303 1 003	Kasatpol PP	Pembina Tingkat I	IV/b
2	TOTOK NURSETYANTO, S.STP	19830530 200112 1 005	Sekretaris	Pembina	IV/a
3	HARIS PRIAMBODO, S.STP	19841117 200312 1 004	Kabid Trantibum	Penata Tk. I	III/d
4	MUH. AKBAR, S.Sos, M.Si	19710217 199403 1 006	Kasi Gakda	Pembina	IV/a
5	SEJO KAHONO, S.Ag	19660307 199403 1 009	Kasi Linmas	Penata	III/d
6	ANIK PANIYATI, S.Sos	19700506 199803 2 005	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d
7	RUDIYETI HERMITA SURATNAWATI, SP	19750127 200701 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d
8	KUNCORO	19690122 199103 1 005	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata	III/c
9	JOKO SANTOSA, SE	19730814 201001 1 003	Bendahara	Penata Muda	III/a
10	M. FAKHRUDIN, S.A.P	19810212 200901 1 002	Pengelola keamanan dan ketertiban	Penata Muda	III/a
11	JOKO NURSUSILO, S.AP	19810723 201001 1 001	Penyidik	Penata Muda	III/a
12	SUSILO HANDAYANI, S.A.P	19810807 201001 1 005	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
13	WARISO SUGIYARTO, S.A.P	19820728 201001 1002	Analisis Manajemen Perkantoran	Penata Muda	III/a
14	NUR SOLEH, S.A.P	19830305 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/a
15	HERI KURNIAWAN, S.AP	19830720 201001 1 004	Penyidik	Penata Muda	III/a
16	DWI SETYORINI, S.AP	19840305 201001 2 002	Penyidik	Penata Muda	III/a
17	ELIYA, S.A.P	19840419 201001 2 004	Pengolah Data penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
18	FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P	19850518 201001 2 003	Pengelola Data	Penata Muda	III/a

19	RAKHMANTO	19650402 200701 1 023	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
20	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
21	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
22	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
23	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
24	MARJOKO	19820102 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
25	AFANDI	19820303 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
26	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
27	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
28	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
29	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
30	WINARKO	19800818 200901 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
31	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
32	KHUSNI ZAKI ZAMANI, A.Md.Kom.	19941010 202202 1 003	Terampil-Pranata Komputer	Pengatur	II/c
33	TRIAMARYANI, A.Md.Ak.	19950514 202202 2 002	Verifikator Keuangan	Pengatur	II/c
34	DAHLAN ZULKARNAIN	19710101 200901 1 009	Pramu Bakti	Juru Tingkat I	I/d
35	MUKHAMAD RIYADO SHOLICHIN	19830531 201001 1 004	Pengemudi	Juru	I/c
	TENAGA BANTU POL PP				
36	AGUNG SANTOSA				
37	ALDO MAULANA PUTRA				
38	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN				
39	ARDIAN BAGAS PRATAMA				
40	AZIZ SOLICHUDIN				
41	BAYU NUGROHO				
42	CHOIRUL MUBAROK				

43	ERLINA RISKI ASTITI				
44	FASA WIDI KURNIAWAN				
45	GHUFRON AFFISINA				
46	IWAN WIDODO				
47	LAILIA NUR FARIDA				
48	LINDA ZARZA ARLITA				
49	MUHAMMAD SALAFUDIN				
50	MUKHAMAD ABDUL BASIT				
51	MUHAMMAD JA'VAR SODIK				
52	NAZARUDIN ULYA				
53	NURVITA OCTIANA				
54	OKTA DWI NUGROHO				
55	OKTA MARY BAGUS HARJANTO				
56	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI				
57	RATNA MAUDY INDRAWASNO				
58	RIZKI NUR FAEDAH				
59	RIZKY YANASARI				
60	ROHMAT AHYAKUL KARIM				
61	ROSSI DEWI RIANA				
62	THUBAGUS NUR MA'ARIF				
63	WAHYU AHMAD FAUZI				
64	WILDAN MAULANA BAEDHOWI				
65	YULI YANA				

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung tidak terdapat Satpol PP dikarenakan petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

4. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta

upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rasio Jumlah Linmas Per RT

Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah Linmas	8.184	8.184	8.184	8.414	8.414	8.414
2.	Jumlah RT	5.916	5.916	5.916	5.913	5.913	5.913
3.	Rasio	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4

Sumber data : laman.temanggungkab.go.id website resmi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.12
Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan se-Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	19	302	547	1,8
2.	Tembarak	13	224	370	1,6
3.	Temanggung	25	562	775	1,3
4.	Pringsurat	14	364	514	1,4
5.	Kaloran	14	416	337	0,8
6.	Kandangan	16	378	489	1,2
7.	Kedu	14	424	430	1,0
8.	Parakan	16	357	412	1,1
9.	Ngadirejo	20	426	450	1,0
10.	Jumo	13	273	395	1,4
11.	Tretep	11	141	341	2,4
12.	Candiroto	14	275	420	1,5
13.	Kranggan	13	382	348	0,9
14.	Tlogomulyo	12	156	372	2,3
15.	Selompampang	12	128	368	2,8
16.	Bansari	13	189	386	2,0
17.	Kledung	13	160	393	2,4
18.	Bejen	14	170	406	2,3
19.	Wonobojo	13	209	364	1,7
20.	Gemawang	10	312	297	0,9
Jumlah		289	5.913	8.414	1,4

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya

337 orang, sehingga ada kekurangan 79 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 34 linmas, di Kecamatan Gemawang kekurangan 15 Linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.13

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHambat	UPAYA PENYELESAIAN
1	Rasio Linmas per RT	1. Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. 2. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas	1. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan /santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. 2. Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan kaena dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan) 3. Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata	1.mengadakan sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan

5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda adalah jumlah warga yang mengalami kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun luka-luka, sedangkan jumlah kejadian adalah jumlah

kegiatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ataupun penegakan Perda dan Perkada.

Rumus Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dibagi Jumlah kejadian dikali 100 %.

Rumus untuk mengetahui Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dibagi jumlah kejadian dikali 100 %.

Tabel. 2.14

Presentase warga negara yang memperoleh layanan
Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada
Tahun 2018 s/d 2023 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	0	0	0
2.	Jumlah kejadian	n.a	n.a	n.a	1880	1470	188
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2023 TW I

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada merupakan indikator program baru pada tahun 2022 triwulan I. Capaian presentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada Tahun 2023 triwulan I sebesar 100%, angka itu di peroleh dari, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di tahun 2023

triwulan I adalah 0 (nol), dengan pengertian bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasif dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka. Jumlah kejadian pada Tahun 2023 triwulan I sebanyak 188. Jumlah 188 adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum Perda dan Perkada, di tahun 2023 sampai dengan triwulan I. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.15
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYEKESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1. Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasif dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	1. Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2. Peningkatan kapasitas PPNS

6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan)

Penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Perda PGOT, IMB, Reklame, Minuman Beralkohol, PKL dan Protokol Kesehatan). Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan dan kesehatan.

Rumus tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketentraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah Pelanggaran K4 yang terselesaikan dibagi jumlah Pelanggaran K4 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali x100%.

Tabel 2.16

Tingkat penyelesaian pelanggaran K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d. 2023 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah pelanggaran K4 (kasus)	249	246	931	1880	2759	502
2.	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan (kasus)	209	246	931	1880	2759	502
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (%)	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel di atas tercantum bahwa jumlah pelanggaran K4 pada tahun 2023 TW I cukup banyak . pelanggaran K4 untuk perda reklame yang bervariasi jenisnya yaitu iklan prodak rokok, iklan tempat pendidikan mulai dari play group sampai perguruan tinggi, iklan perumahan, iklan produk kartu telekomunikasi, sangat banyak ditemukan pada Tahun 2023 triwulan I. Pelanggaran perda PGOT berada di dua kecamatan yaitu temanggung dan kecamatan Parakan, adanya warga masyarakat yang menyalahi ijin IMB dan belum memiliki IMB adalah jenis pelanggaran yang terkait ijin IMB, pelanggaran perda Minuman Beralkohol hanya terdapat satu yaitu di wilayah kota temanggung. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung adalah 100%. Data pelanggaran Peraturan Daerah/terkait K4 Tahun 2023 TW I tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Tabel Data Pelanggaran Perda terkait K4 per kecamatan
Tahun 2023 TW I

N0	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran
1	Temanggung	75
2	Tlogomulyo	20
3	Tembarak	14
4	Selopampang	12
5	Kranggan	46
6	Pringsurat	41
7	Kaloran	16
8	Kandangan	25
9	Kedu	52
10	Bulu	32
11	Jumo	20
12	Parakan	37
13	Kledung	22
14	Bansari	9
15	Ngadirejo	30
16	Candiroto	15
17	Wonoboyo	6
18	Tretep	4
19	Bejen	19
20	Gemawang	7
		502

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

7. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Banyaknya kelompok patroli

dibagi Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota.

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman tahun 2018 s/d 2023 TW I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Banyaknya patroli dalam satu tahun	50	52	265	503	727	80
2.	Jumlah kecamatan	20	20	20	20	20	20
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2,5	2,6	13,25	25,15	36,3 5	3,6

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kegiatan patroli siaga dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sampai pada triwulan I tahun 2023 kegiatan patroli dilakukan sebanyak 72 patroli, Patroli dilaksanakan ditempat tempat wisata dan patroli rutin malam untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum. Di samping kegiatan patroli rutin di beberapa kecamatan. kegiatan patroli ini sangat penting untuk menggali data awal pelanggaran-pelanggaran tramtibum agar dapat digunakan untuk giat penertiban dan penegakan Perda selanjutnya. Kegiatan patroli dapat berjalan lancar meskipun tidak diikuti peningkatan dan penambahan personil serta sarana prasarana secara signifikan.

Data Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 TW I tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Tahun 2023 s/d TW I

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Keg. Patroli	Hasil
1	Temanggung	Citywalk Jalan Jendral Soedirman, Taman Kali Progo dan Aloon-aloon Temanggung	53 x patroli	Didapati beberapa anak punk dan remaja yang mengkonsumsi miras, dan beberapa PKL yang melanggar Perda
		Pasar Kliwon, Taman Pengayoman		Didapati PKL yang berjualan di Trotoar dan bahu jalan, dan beberapa anak punk
				Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
2	Kledung	Taman Posong, Kruwisan	1x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi.
		Rest Area		Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
3	Kaloran	Pasar Kaloran	1 x patroli	Didapati sejumlah pelanggaran K4 (spanduk melintang dan banner di pohon) Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
4	Kandangan	Jalur kecamatan	2 x patroli	Didapati spanduk dan banner yang melanggar

				Perda
		Wilayah kecamatan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
5	Tembarak	Pasar Menggoro	1 x patroli	Terdapat spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Jalur kecamatan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
6	Parakan	Taman Bambu Runcing	4 x patroli	Didapati beberapa anak punk, serta beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Pasar legi Parakan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
7	Ngadirejo	Pasar Ngadirejo	2 x patroli	Beberapa PKL di bahu jalan dan trotoar, spanduk dan banner yang melanggar Perda, Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
8	Candiroto	Pasar Candiroto	1 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
9	Kedu	Wilayah Kecamatan Kedu	5 x patroli	Spanduk melintang dan banner di pohon
		Pasar Kedu		Soialisasi pencegahan

				dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
10	Selopampang	Pasar Selopampang dan jalur kecamatan	1 x patroli	Beberapa spanduk dan banner melintang di jalan Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
11	Bansari	Wilayah Kecamatan Bansari	0 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
12	Bejen	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
13	Bulu	Wilayah Kecamatan Bulu	2 x patroli	Beberapa spanduk melintang dan banner di pohon Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
14	Jumo	Pasar Jumo Jalur kecamatan	1 x patroli	Beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
15	Pringsurat	Pasar Pingit	1 x patroli	Didapati beberapa produk rokok ilegal, spanduk, banner yg melanggar Perda, Bangunan yg blm

				berijin, PGOT yg berkeliaran di jalan
16	Kranggan	Badran	3 x patroli	Ditemukan beberapa anak punk, spanduk dan banner yg melanggar Perda
		Pasar Kranggan		
		Kawasan industry/pabrik		
		Jalan nasional		
17	Tretep	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
18	Tlogomulyo	Ruas jalan di Kecamatan Tlogomulyo	2 x patroli	Ditemukan beberapa PKL dan spanduk, banner yg melanggar Perda
19	Wonobojo	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
20	Gemawang	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perdda dan Perbup
Jumlah			80	

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

8. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan

pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu

kawasan WMK;

- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.
- e. Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah luas WMK kabupaten/kota

$$\frac{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}}{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candioto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo.
2. Pos Pemadam Wilayah Candioto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candioto, beralamat di Jl. Candioto no. 32; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Candioto, Kec Bejen, Kec Tretep, Kec Wonoboyo.
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat

no. 1. Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Pringsurat, Kec Kaloran, Kec Kranggan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018
s.d Tahun 2023 TW I

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2023 Tw I

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 TW I tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.21

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
----	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

1	Cakupan Penanganan bencana kebakaran Kabupaten	Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat
---	--	--	--	--

9. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.22
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
----	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	<p>1. sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dn candiroto yg dpt sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakara.</p> <p>2. Kondisi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja</p> <p>3. media sosial membantu mempercepat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dn ditanggulangi</p>	<p>1. kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang yg dpt membahayakan keselamatan org yg ada ddlm kendaraan maupun yg berada di sekitar kendaraan damkar</p> <p>2. kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian</p> <p>3. kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dn lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien</p> <p>4. kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota</p>	memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran
---	--	--	--	--

			<p>dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman</p> <p>5. kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dn sering dipergunakan menakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll</p>	
--	--	--	---	--

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	44	33	30	23	21	5
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	63	77	54	30	35	8
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	69,8%	42,86%	55,56%	76,67%	60%	62,5%

a : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Dari 14 kasus kebakaran di Temanggung, hanya 8 kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- b) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;

- c) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- d) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- e) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- f) Perubahan kondisi lalu lintas;
- g) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- h) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- i) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- j) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 TW I

N O	Tanggal	Inf o Ma su k	Sa mp ai lo ka si	Se le sa i	Pe mi li k/ Pe lap or	Alamat	Fungs i Bang un an Yang Terba kar	Penye bab	Keru gian	Aset yang tersel amatk an	Korb an Jiwa	Korb an Terd amp ak
1	02/01/2023	23.27	23.39	0003	Ibu Turi	Sejayan RT 02 RW 01 Campursari Bulu	rumah	rokok	170.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	7
2	03/01/2023	06.51	06.55	0006	safir a	Ngadipiro Walitelon Utara Temanggung	Dapur	Tabung gas	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000	Nihil	4
3	14/01/2023	12.40	01.15	0000	warga	Kledung Rt 004 RW 002	Rumah	Konsletung	Rp 120.000.000	Rp 1.200.000.000	Nihil	8

				5				listrik	0	0		
4	18/01/2023	05.00	05.11	06.31	warga	Kranggan RT 01 RW 05	Kabel Listrik JTT (Jaringan Tegangan Tinggi)	Konsletung listrik			Nihil	
5	18/01/2023	21.20	21.25	03.30	BP Haris	Sapuran Wonosobo	penampungan				Nihil	
6	25/01/2023	22.35	22.42	23.16	bp didik	Kebondalem Pringsurat	Depo kayu	Konsleting Listrik	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000	Nihil	33
7	28/01/2023	04.10	04.30	07.13	Bp Mar diyat	Jetis Lor Kauman Parakan	Warung angkri ngan	tungku	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000	Nihil	28
8	02/02/2023	16.46	16.49	17.04	Bp. Sum arto no	Tegalsari Sidorejo Maron	Ruko	Kompor	5.000.000	Rp 200.000.000	Nihil	15
9	10/02/2023	17.52	18.10	19.05	Bp. Tugi yono	Selosabrang Bejen	Rumah	Tungku	Rp 30.000.000	Rp 150.000.000	Nihil	33
10	15/02/2023	15.45	16.00	17.00	Ibu Siti	Wonogiri, Gentan Kranggan	Kabel PLN	Konsleting Listrik	Rp 500.000	Rp 5.000.000	Nihil	77
11	26/02/2023	18.51	19.03	20.07	ibu Ningsing	Kupen Kauman Pringsurat	Rumah hunian	Konsleting Listrik	Rp 150.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	56
12	02/03/2023	09.48	10.03	10.30	Ban gkit	Ngimbrang Kauman Bulu	Rumah hunian	Konsleting Listrik	30.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	70
13	08/03/2023	14.40	14.59	17.05	Warga	Karangsari Parakan	Rumah hunian	Konsleting Listrik	Rp 500.000.000	Rp 750.000.000	Nihil	66
14	24/03/2023	09.00	09.22	09.05	Ibu Istiyana	Setrobayan Ngadimulyo	Rumah hunia	Tungku	Rp 5.000	Rp 120.000	Nihil	38

				5	h	Kedu	n		.000	0.000		
15	31/03/2023	05.15	05.34	08.37	Bp Sla met	Namgunsari Badran Kranggan	Kanda ng ayam	Konsle ting Listrik	Rp 9.000 .000. 000		Nihil	15

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 Tw IV

Keterangan :

1. Tabel Warna Merah menerangkan respontime di atas 15 menit
2. Warna Putih menerangkan respontime di bawah 15 menit
3. Tabel Warna Hijau menerangkan masuk dalam WMK (Wilayah Manajement Kebakaran RISPK)
4. Tabel Warna Biru menerangkan penanganan Kebakaran di Luar Wilayah Kabupaten Temanggung

10. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%.

Tabel 2.25

Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	18	18	19	18	44	53
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	53	53	54	56	55	55
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33,9%	35,9%	35,19 %	32,14 %	80%	96,36%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Sesuai tabel diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 adalah 19 orang di awal tahun 2021 ada satu personil pemadam yang pindah tugas (mutasi) sehingga personil dan yang memenuhi standar menjadi 18 orang, Pada tahun 2022 ini ada penambahan personil yang mengikuti diklat sehingga aparatur Pemadam yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 23 orang, Pada bulan November 2022 ada penambahan personil yang mengikut diklat sebanyak 21 personil Dan pada tahun 2023 ada penambahan personil yang mengikuti diklat sebanyak 9 orang jadi jumlah keseluruhan yang mengikuti diklat sebanyak 53 personil. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.26
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	1. anggota damkar melaksanakan latihan mandiri berdasarkan tayangan youtube atau sharing pengalaman dari yang sudah pelatihan. 2. kejadian kebakaran khususnya penyelamatan lainnya mulai bervariasi sehingga bisa dijadikan ajang latihan dan menambah pengalaman	1. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 2. Informasi terkait pelatihan terbatas. 3. Alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil	Mengikuti kegiatan ² yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar (baik pelatihan maupun lomba)
---	---	--	--	--

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Daftar anggota *pemadam* yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.27

Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Tahun 2023 TW I

No.	Nama	NIP	Jabatan	Golongan/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	RAMA ADHITIA CAHYA.SIP.MAP	19870303 200701 1 002	Kabid Damkar	III/d	Pemadam Tingkat I , Rescue Pertolongan dan Penyelamatan serta Inspeksi Proteksi Kebakaran
2	WAHYU HARYANTO	19650312 199003 1 012	Kepala Seksi Pencegahan	III/d	

			dan Pemberdayaan		
3	EDI IRWANTO,S.A.P	19860430 201001 1 001	Kasi Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi kebakaran	III/b	
4	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Operator Mesin	III/b	Pemadam Tingkat I
5	DEDY CHRISTANTO, S.AP	19811220 200801 1 008	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
6	MUSTRIWANTO, S.AP	19760229 200701 1 005	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
7	ARIF BUDI HARSANTO, S.Sos	19840609 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
8	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat I
9	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat II
10	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
11	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
12	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
13	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
14	ACHMAD SYAFI'	19760622 200701 1 007	Operator Mesin	II/a	Pemadam Tingkat I
15	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Operator Mesin	I/d	Pemadam Tingkat I
Satgas Pemadam Kebakaran					
16	AHMAD SYARIF A.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
17	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
18	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I

19	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
20	ARLI TAUFIK	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
21	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
22	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
23	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
24	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
25	DAVIT HIMAWAN UTOYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
26	DHIMAS BANGKIT PANUNTUN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
27	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
28	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
29	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
30	HAFIDZ NURUL AMIN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
31	HARIS PRASETYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
32	HASAN TAFSIR	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
33	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
34	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
35	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
36	JONTA AYOMAGE AKITA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
37	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
38	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
39	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
40	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
41	MOCHAMAD FAIZAL R.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
42	MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
43	MUHAMMAD NURROKHIM	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
44	MUHAMMAD TOYYIB NUR RAHMAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
45	NUR RIFA FADHLIKA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
46	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
47	PANGESTU MULYA NOVANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
48	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1

49	SADDAM GIRI SANTOSO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
50	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
51	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
52	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
53	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
54	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
55	UJIEK PRASTIYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 – 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Mobil Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh personil Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Di atas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai adalah Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai dibagi Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dikali 100%.

Tabel 2.28

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter

Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	10	10	10	10	10	10
2.	Jumlah mobil kebakaran pada WMK	13	13	13	13	13	13
3.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Sebagian dari data tabel di atas sejak tahun 2018-2022 TW I untuk prosentase rasio mobil Damkar tidak mengalami peningkatan atau penambahan armada baru meskipun beberapa dinyatakan tidak layak. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Sebagian armada pemadam kebakaran kondisinya sudah berumur dan spesifikasinya kurang handal untuk menempuh medan yang berat dengan membawa muatan air;
- b. Ada kendaraan yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan chassis dan body kendaraan sehingga torsi/ tenaga dan performa kendaraan kurang maksimal.

Data kendaraan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Tahun 2023

No	Nama Kendaraan	Nopol	Merk	Seri	Tahun Pembuatan	Kondisi kendaraan
1	PMK 01	AA 9591 LE	Isuzu	FTR 33/200 Ps	2004	Kurang Layak

2	PMK 02	AA 9590 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak layak dan tidak bs digunakan
3	PMK 03	AA 9589 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak Layak dan tidak bs digunakan
4	TA. 4000L	AA 9533 JE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Layak
5	Tanki Air. 5000L	AA 9597 ME	Mitsubishi	FE 349/ 120 Ps	2006	Layak
6	PMK 04 (Ziegler)	AA 9585 PE	Hino	Dutro/ WU342R/ 130 HD	2012	Tidak Layak
7	FIRE JEEP	AA 9593 AE	Toyota	Hilux Pick Up 2,5L D	2014	Layak
8	AYYAX CSR	AA 9599 BE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2016	Layak
9	TA CSR	AA 9531 KE	Mitsubishi	Colt Diesel FE Super HD	2016	Layak
10	AYYAX PRINGSURAT	AA 9596 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
11	TA PRINGSURAT	AA 9560 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak
12	AYYAX CANDIROTO	AA 9597 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
13	TA CANDIROTO	AA 9559 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2023 Tw I

11. Persentase warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah. $\times 100\%$

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X

Tabel 2.30

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	44	33	30	21	28	6
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	63	77	54	44	64	14
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	69,8%	42,5%	55,5%	47,72	43,75%	42,85%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018. Total untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran yaitu 15 kejadian Kebakaran, yang digunakan sebagai perhitungan hanya 14 dikarenakan

terdapat 1 pelayanan kejadian kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Temanggung.

Dari data tabel 2.18 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan I baru tercapai 42,85% menurun dari Tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2022 Triwulan IV kasus kebakaran banyak terjadi di luar Wilayah WMK. Untuk tahun 2023 triwulan I jumlah kebakaran mencapai 44 kasus dan yang respontime kurang dari 15 menit sejumlah 6 kasus, sehingga capaian layanan kebakaran mencapai 42,85%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.31
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan informasi	1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar

		kejadian kebakaran sampai ke pos Damkar untuk segera ditindaklanjuti	evakuasi. 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	
--	--	--	--	--

12.Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, di Kabupaten Temanggung penghitungan indikatornya sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Perangkat Daerah

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x $\frac{X}{100\%}$

Tabel 2.32

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 Tw I

NO	Uraian	Tahun 2023 TW I
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	64
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran	0%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Dari data tabel 2.19 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan I tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam menangani Kebakaran untuk jumlah kasus kebakaran tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 2.19.

13. Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten

- Evakuasi sarang tawon;
- Penanganan pohon tumbang;
- Penanganan kecelakaan lalu lintas;
- Percobaan bunuh diri;

- e. Evakuasi korban terjatuh di sumur;
- f. Evakuasi korban hanyut;
- g. dll.

Rumus indikatornya yaitu jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah di kabupaten/ kota dalam tahun X. Untuk satuan indikatornya adalah jumlah dan jenis, berikut data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).

Tabel 2.33

Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Tahun 2017 s.d Tahun 2022 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) dalam Tahun X	n.a	105	268	310	468	137

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 137 kasus pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I terdiri dari :

- a. Evakuasi Sarang Tawon 73 (Tujuh Puluh Tiga) kali;
- b. Penangan tanah longsor 7 (Tujuh) kali;
- c. Penanganan hewan buas/berbisa 27 (Dua Puluh Tujuh) kali;
- d. Penanganan Pohon Tumbang 8 (Delapan) kali;
- e. Penanganan solar tumpah di jalan 9 (Sembilan) kali;
- f. Penanganan Cincin sulit di Lepas 7 (Tujuh) kali;
- g. Penyemprotan material di jalan 3 (Tiga) Kali;
- h. Penanganan kunci mobil terkunci dalam mobil 0 () kali;

- i. Penanganan Orang Tercebur Sumur 0 () Kali;
- j. Evakuasi korban Kecelakaan/ laka 3 (Tiga) kali;
- k. Giat penanganan konsleting listrik () kali.

Tabel 2.34

Tabel daftar penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh

Pemadam Kebakaran Tahun 2023 TW I

NO	PENANGGULANGAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI			PENYEBAB	OBJEK PENYELAMATAN	KERUGIAN/ KORBAN
	HARI / TANGGAL	WAKTU	LOKASI			
1	Minggu 1 Januari 2023	21.25 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Lingkungan Kebonsari Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Cahyono/ Rumah hunian	Nihil
2	Minggu 1 Januari 2023	22.58 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Somokaton Pandemulyo Bulu	Sudah lama bersarang	Bp Wahyu/ Rumah	1 orang tersengat lebah
3	Minggu 1 Januari 2023	22.40 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Bendo Depokharjo Parakan	Sudah lama bersarang	Bp Mustofa/ Rumah	Nihil
4	Minggu 1 Januari 2023	23.15 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dudun Padureso Ds Padureso Parakan	Sudah lama bersarang	Bp Widiyatmoko/ Rumah	Nihil
5	Minggu 1 Januari 2023	00.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Petirejo Ngadirejo	Sudah lama bersarang	Bp Bambang/ Rumah	Nihil
6	Senin 2 Januari 2022	13.49 WIB	Giat evakuasi kera di Baturisari Candirito (animal rescue)	Mencari makan	Bp Bejo/ pemukiman warga	Nihil
7	Senin 2 Januari 2022	21.21 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Korpri Badran blok c no 39 Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Windu/ rumah	Nihil
8	Senin 2 Januari 2022	22.10 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Korpri Badran blok c no 96 Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Arba'i/ Rumah	Nihil
9	Senin 2 Januari 2022	20.39 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Madureso Asri Cekelan Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Bambang/ Rumah	
10	3 Januari 2023	20.30 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dusun Mayongan Jeketro Kledung	Sudah lama bersarang	Bp Utoyo/ rumah	1 orang tersengat lebah
11	3 Januari 2023	21.53 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Tejosari Kauman	Sudah lama bersarang	ibu diah/ Rumah	1 orang tersengat lebah

			Parakan			
12	3 Januari 2023	23.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Semondo Mondoretno Bulu	Sudah lama bersarang	Ibu Dini/ Rumah	Nihil
13	Rabu 4 Januari 2023	19.30 WIB	Giat pembersihan materiak tanah longsor di Jl Kranggan Kaloran Gentan Kranggan Temanggung	curah hujan	Warga/ Jalan	4 orang pengendara sepeda motor terjatuh
14	Rabu 4 Januari 2023	21.12 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Kayogan Sidorejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Hari/ rumah	1 orang tersengat lebah
15	Kamis 5 Januari 2023	00.50 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Jl Raya Kaloran Sumowono, Lamuk Kalimanggis Kaloran	curah hujan	Anggota polri/ pengguna jalan	Nihil
16	Kamis 5 Januari 2023	13.00 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Karangmulyo Gentan Kranggan Temanggung	curah hujan	Darmadi/ pengguna jalan	Nihil
17	Kamis 5 Januari 2023	13.29 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Jl Raya Kaloran Sumowono, Lamuk Kalimanggis Kaloran	curah hujan	Bpk Thoifur/ pengguna jalan	Nihil
18	Kamis 5 Januari 2023	19.56 WIB	Giat evakuasi pohon tumbang di Projo Madureso Temanggung	curah hujan	Ibu indah/ pengguna jaan	1 orang luka
19	Jum'at 6 Januari 2023	15.34 WIB	Giat evakuasi ular di Soropadan Pringsurat	Mencari makan	Ibu Sulis/ rumah	Nihil
20	Sabtu 7 Januari 2023	15.25 WIB	Giat evakuasi ular di Papoan Madureso Temanggung	Mencari makan	Bp Gito/ rumah	Nihil
21	Sabtu 7 Januari 2023	19.50 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Bagusani Selopampang	Sudah lama bersarang	Bp Agus/ TPQ	2 Org tersengat
22	Sabtu 7 Januari 2023	19.15 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Raya Ngadirejo Tmg	Sudah lama bersarang	Bp Suhodo/ apotik	2 Org tersengat
23	Sabtu 7 Januari 2023	20.10 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Wonoboyo RT 010	Sudah lama bersarang	Ibu Suprapti/ rumah	Nihil
24	Sabtu 7 Januari 2023	21.34 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Kwagean Bansari	Sudah lama bersarang	Bp Mujari/ rumah	3 orang tersengat
25	Kamis 12 Januari 2023	16.15 WIB	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	ibu Lestari/ jari tangan	
26	Jumat 13 Januari	13.37 WIB	Giat evakuasi ular di Ngimbrang Kauman Bulu	Mencari makan	Bp Bothok/ Warung	

	2023					
27	Jumat 13 Januari 2023	20.03 WIB	Giat Evakuasi sarang tawon di Ngijingan Candimulyo Kedu	Sudah lama bersarang	Bp Ujiyanto/ rumah	1 orang tersengat lebah
28	Jumat 13 Januari 2023	21.25 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di SDN Pagersari Ngempon Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Ibu Sarinah/ gedung sekolah	4 orang tersengat lebah
29	Jumat 13 Januari 2023	20.24 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Candiroto	Sudah lama bersarang	Bp Khabib/ rumah	1 orang tersengat lebah
30	Jumat 13 Januari 2023	20.55 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di jamusan Jumo Temanggung	Sudah lama bersarang	B andri S/ jalan menuju sawah	9 orang tersengat lebah
31	Sabtu 14 Januari 2023	13.14 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Pesantren Wonobooyo	curah hujan	Rohmadi/ pengguna jalan	1 pengendara terjatuh
32	Minggu 15 Januari 2023	13.19 WIB	Giat pelepasan Cincin di Pos Damkar Pringsurat	kekecilan	Sdr Angga/ jari tangan	Nihil
33	Senin 16 Januari 2023	00.39 WIB	Giat pembersihan solar tumpah	isi tanki penuh	Bp Toro/ pengguna jalan	Nihil
34	Senin 16 Januari 2023	20.14 WIB	Giat animal rescue (kucing) di dsn branti Kandangan	terjepit tumpukan kayu	Bp Ade kurniawan/ kucing	Nihil
35	Jumat 20 Januari 2023	19.24 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Perintis Kemerdekaan Jurang Temanggung	Sudah lama bersarang	Ibu Endah/ rumah	Nihil
36	Jumat 20 Januari 2023	19.29 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Raya Bejen Tretep Tlogo Tretep	Sudah lama bersarang	Bp oyong/ gedung sekolah	2 Org tersengat
37	Sabtu 21 Januari 2023	09.45 WIB	Giat evakuasi pemotongan kayu di Gowak Kranggan Pringsurat	Membahayakan penghuni rumagh (mengenai molo atap rumah)	Bp Joko/ Rumah	Nihil
38	Sabtu 21 Januari 2023	12.19 WIB	Giat evakuasi korban tersengat listrik di Mangunsari Ngadirejo	tersengat listrik	Puskesmas Candiroto	1 orang
39	Sabtu 21 Januari 2023	20.44 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Dakaran Geblok Kaloran	Sudah lama bersarang	Aji wijayanto/ rumah	1 orang tersengat lebah
40	Sabtu 21 Januari 2023	22.03 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di kauman Gondangwayang Kedu	Sudah lama bersarang	Ibu Waliyati/ rumah	Nihil

41	Sabtu 21 Januari 2023	20.20 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondang Manggong Ngadirejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bapak Marsidi/ rumah	2 Org tersengat
42	Minggu 22 Januari 2023	15.00 WIB	Giat evakuasi ular di Perum Candi Asri Kedu	Mencari makan	Ibu Isti/ rumah	Nihil
43	Minggu 22 Januari 2023	21.00 WIB	Giat evakuasi ular di Banyurip Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Nasim/ rumah	1 org tersengat
44	Minggu 22 Januari 2023	15.00 WIB	Giat penyemprotan material tanah di Jamusan Jumo	Pasca baksos grastrack	Bp Anton/ jalan	Nihil
45	Senin 23 Januari 2023	11.45 WIB	Giat evakuasi ular di kauman Candiroto	Mencari makan	Bp Aji/ rumah	Nihil
46	Senin 23 Januari 2023	19.40 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Pringsurat Temanggung	Sudah lama bersarang	Rumah	2 orang tersengat
47	Selasa 24 Januari 2023	07.15 WIB	Giat evakuasi ular di Perum Candi Asri Candimulyo	Mencari makan	Ibu Vita/ rumah	Nihil
48	Selasa 24 Januari 2023	14.13 WIB	Giat penyemprotan tumpahan material di payungan Walitelon Utara	isi tanki penuh	Bp Subandi/ jalan	2 org pengendara terjatuh
49	Selasa 24 Januari 2023	15.30 WIB	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	Sdr Bagus/ jari tangan	
50	Rabu 25 Januari 2023	20.43 WIB	Giat evakuasi kucing di Mujahidin Temanggung	terjebak di atap	Bp Eri/ kucing	Nihil
51	Rabu 25 Januari 2023	20.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondangan Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp M Fathurohman/ rumah	9 orang tersengat lebah
52	Jum'at 27 Januari 2023	20.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dotakan Candiroto	Sudah lama bersarang	Ibu Juminem/ rumah	Nihil
53	Jum'at 27 Januari 2023	21.12 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jogomertan Kauman Parakan	Sudah lama bersarang	Ibu Alea Rochim/ rumah	Nihil
54	Jum'at 27 Januari 2023	22.23 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Kandangan Temanggung	Sudah lama bersarang	Aprilintia/ rumah	Nihil
55	Sabtu 28 Januari 2023	20.30 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondangan Tlogorejo	Sudah lama bersarang	Bp M Fathur	Nihil
56	Minggu 29 Januari 2023	15.15 WIB	Giat evakuasi ular di desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat	Mencari makan	Bp Eko Puspojo/ rumah	Nihil

57	Minggu 29 Januari 2023	18.59 WIB	Giat evakuasi ular di desa Kauman Ngimbrang Bulu Temanggung	Mencari makan	Ibu Bingah/ rumah	Nihil
58	Minggu 29 Januari 2023	21.03 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Paingan Purworejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Ari	Nihil
59	Senin 30 Januari 2023	20.47 WIB	Giat evakuasi ular di Banyurip Timur Temanggung	Mencari makan	Bp Totok	Nihil
60	Jum'at 3 Februari 2023	21.32 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Pikatan Water Park Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengunjung tempat wisata	2 orang tersengat
61	Sabtu 4 Februari 2023	21.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jurang Danupayan Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	2 orang tersengat
62	Senin 6 November 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dinas Pendidikan Kab Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh Karyawan Dinas	2 orang tersengat
63	Rabu 8 Februari 2023	14.28 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jalan Perintis Kemerdekaan Tlogorejo Temanggung	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
64	Kamis 9 Februari 2023	19.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Krecek Candirotto Temanggung	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
65	Jum'at 10 Februari 2023	17.26 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Kalianpo Pringsurat	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
66	Sabtu 11 Februari 2023	10.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jragan Tembarak	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
67	Sabtu 11 Februari 2023	19.55 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Sarang Tawon di Gedung Pertanian Kertosari	Sudah lama bersarang	Penghuni Gedung	2 Orang trsengat lebah
68	Sabtu 11 Februari 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Sarang Tawon di Kebonagung Kecamatan selopampang	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
69	Sabtu 11 Februari 2023	19.44 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Nglaruk Bantir Candirotto	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	Nihil
70	Minggu 12 Februari 2023	06.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	Pemilik Cincin	Nihil
71	Minggu 12 Februari 2023	16.47 WIB - Selesai	Giat Evakuasi ular di Banyurip Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
72	Senin 13 Februari 2023	19.47 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Banjarsari Kebumen Pringsurat	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	Nihil

73	Senin 13 Februari 2023	20.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SDN Tlogorejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pengajar SD	2 Orang tersengat lebah
74	Selasa 14 Februari 2023	20.55 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di batikan Soropadan Pringsurat	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
75	Selasa 14 Februari 2023	21.00 WIB - Selesai	Giat animal rescue (ular) di dsn Malebo Karangwuni Pringsurat	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
76	Kamis 16 Februari 2023	20.05 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SD Muhamadiyah Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pendidik	2 Orang tersengat lebah
77	Jum'at 17 Februari 2023	10.15 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Maron Permai Sidorejo Temanggung	isi tanki penuh	Pengguna jalan	1 pengendara terjatuh
78	Minggu 19 Januari 2023	20.45 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Karangwuni Sriwungu Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
79	Senin 20 Februari 2023	17.50 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SDN 2 Muncar Gemawang	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pendidik	8 Siswa tersengat lebah
80	Senin 20 Februari 2023	11.55 WIB - Selesai	Giat animal rescue (biawak) di Dotakan Candiroto Temanggung	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
81	Senin 20 Februari 2023	12.07 WIB - Selesai	Giat animal rescue (ular) di Kauman Candiroto Temanggung	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
82	Sabtu 25 Februari 2023	19.03 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Mujahidin Giyanti Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengguna tempat ibadah (Masjid)	1 Orang tersengat lebah
83	Senin 27 Februari 2023	19.09 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di jalan Kranggan Pringsurat (Pasar Bedono)	isi tanki penuh	Pengguna jalan	9 Pengendara motor terjatuh
84	Senin 27 Februari 2023	20.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	4 orang tersengat lebah
85	Selasa 28 Februari 2023	13.12 WIB - Selesai	Giat pembersihan solar tumpah di Pagerjuran Jamusan Jumo	Sudah lama bersarang	Pengguna Jalan	2 Pengendara terjatuh
86	Kamis 2 Maret 2023	20.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Alun-alun Temanggung	Sudah lama bersarang	pengunjung	Nihil
87	Jum'at 3 Maret 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Larangan Luwuk Bejen	Sudah lama bersarang	bangunan sekolah dan penghuni	Nihil
88	Jum'at 3 Maret 2023	20.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Bagus Selopampang Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	2 Orang tersengat lebah

89	Sabtu 4 Maret 2023	05.45 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Madureso Temanggung	Mencari makan	Bp Yayan (rumah hunian)	Nihil
90	Sabtu 4 Maret 2023	20.15 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Mendongan Muntung Candirotro	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
91	Minggu 5 Maret 2023	09.52 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Margasari Jampirejo Temanggung	Membahaya kan bangunan Masjid	Pengguna tempat ibadah (Masjid)	Nihil
92	Minggu 5 Maret 2023	13.53 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Krajan Pringsurat Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
93	Minggu 5 Maret 2023	20.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Brojolan Barat Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
94	Senin 6 Maret 2023	20.34 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Perim Argodewi Mungseng Giyanti Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
95	Selasa 7 Maret 2023	14.12 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Gandokan Kranggan Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
96	Selasa 7 Maret 2023	20.11 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jurang Kedungumpul Kandangan	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
97	Kamis 9 Maret 2023	11.08 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Petirejo Ngadirejo	Isi tangki penuh	Pengguna jalan	Nihil
98	Kamis 9 Maret 2023	20.32 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Legoksari Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengunjung fasilitas umum	1 Orang tersengat lebah
99	Kamis 9 Maret 2023	19.48 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Combrang Selosabrang Bejen	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	5 Orang tersengat lebah
100	Jum'at 10 Maret 2023	11.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Geneng Kowangan Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
101	Jum'at 10 Maret 2023	17.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Bendan Mudal Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
102	Sabtu 11 Maret 2023	21.20 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Rowoseneng Krajan Kandangan	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
103	Minggu 12 Maret 2023	12.05 WIB - Selesai	Giat evakuasi mobil terperosok ke selokan di Sariyam Parakan Temanggung	Terperosok ke dalam selokan	Pemilik kendaraan	Nihil
104	Minggu 12 Maret 2023	19.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Tloyo Karanggedong Ngadirejo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah

105	Minggu 12 Maret 2023	20.36 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Sempon Sriwungu Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
106	Minggu 12 Maret 2023	22.56 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jubug Wanutengah Parakan	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
107	Senin 13 Maret 2023	19.05 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Jalan Raya Kranggan	Isi tangki penuh	Pengguna Jalan	5 Pengendara Sepeda Motor terjatuh
108	Senin 13 Maret 2023	16.09 WIB - Selesai	Giat Evakuasi kera di paponan Kecamatan Parakan	Mencari makan	Warga	Nihil
109	Senin 13 Maret 2023	21.15 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dalangan Campursari Bulu	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
110	Selasa 14 Maret 2023	08.01 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Jl Geneng Temanggung	Isi tangki penuh	Pengguna Jalan	3 Pengendara Sepeda Motor terjatuh
111	Rabu 15 Maret 2023	13.04 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Jambon Kerokan Tlogomulyo	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
112	Rabu 15 Maret 2023	19.16 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dukuh Karawitan Candirotto	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	10 orang twrsengat lebah
113	Jum'at 17 Maret 2023	07.57 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Kauman Candirotto	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
114	Jum'at 17 Maret 2023	15.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Punduhan Kandangan	Curh hujan	Pengguna jalan	Nihil
115	Jum'at 17 Maret 2023	21.24 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Karangsari Salamsari Kedu	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
116	Sabtu 18 Maret 2023	06.25 WIB - Selesai	Giat evakuasi korban laka lantas di JL Ambarawa Soropadan Pringsurat	Laka Lantas	pengemudi mobil	1 orang terjepit
117	Sabtu 18 Maret 2023	20.40 WIB - selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Candi Asri CandiMulyo Kedu	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
118	Sabtu 18 Maret 2023	19.56 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Batikan Soropadan Pringsurat	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
119	Minggu 19 Maret 2023	20.13 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Dsn Sragan Menggoro Tembararak	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
120	Selasa 21 Maret 2023	20.37 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Bangunsari Bansari	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
121	Rabu 22 Maret 2023	21.03 WIB -	Giat evakuasi sarang tawon di Tejolopo Tegalrejo Bulu	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah

		Selesai				
122	Kamis 23 Maret 2023	20.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Tegaltenu Manding Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
123	Sabtu 25 Maret 2023	20.20 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Pringsurat	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
124	Sabtu 25 Maret 2023	20.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jamusan Jumo	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
125	Minggu 26 Maret 2023	14.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jalan Magelang Semarang	Curh hujan	pengguna jalan	1 orang luka
126	Minggu 26 Maret 2023	21.12 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Margasari Jampirejo	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
127	Minggu 26 Maret 2023	21.25 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Patekan Wonoboyo	Sudah lama bersarang	pengguna jalan	Nihil
128	Senin 27 Maret 2023	07.54 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Cincin di Mako Induk Temanggung	Kekecilan	Ibu Sarimi	Nihil
129	Senin 27 Maret 2023	13.40 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Tanah Longsor di Demangan Pingit Pringsurat	Kekecilan	Ibu Reni	Nihil
130	Senin 27 Maret 2023	17.00 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Cincin di Mako Induk Temanggung	Kekecilan	Ibu Reni	Nihil
131	Selasa 28 Maret 2023	10.11 WIB - Selesai	Giat penyemprotan tumpahan material di Jl Diponegoro	Kelebihan muatan	Pengguna Jalan	Nihil
132	Selasa 28 Maret 2023	17.17 WIB - Selesai	Giat evakuasi Material Tanah Longsor di Demangan Pingit Pingsurat	Curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
133	Rabu 29 Maret 2023	15.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi Material Tanah Longsor di Demangan Pingit Pingsurat	Curah hujan	Pengguna jalan	4 Pengendara terjatuh
134	Kamis 30 Maret 2023	09.55 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah Jl Dr Cipto Temanggung	Isi tangki penuh	Pengguna jalan	2 Pengendara terjatuh
135	Kamis 30 Maret 2023	21.03 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jetis Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
136	Kamis 30 Maret 2023	21.53 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jetis Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
137	Jum'at 31 Maret 2023	18.45 WIB - Selesai	Giat penyemprotan tumpahn minyak di Jl Parakan Wonosobo Paponan	Isi tangki penuh	pengguna jalan	15 pengendara spm terjatuh

Sumber data: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Hal ini disebabkan karena jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

- Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 belum terdapat tambahan pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).

Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala diantaranya :

- a) Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang
- b) Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk
- c) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- Indikator Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya suber air (Goundtank);
- b) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran ;
- c) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- d) Perubahan kondisi lalu lintas;
- e) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- f) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- g) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam

hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.

2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
8. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
9. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan

masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.

4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli
6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum

Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Fasilitasi kunjungan tamu
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- f. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- g. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
- h. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- i. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- j. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri
- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
- m. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- n. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- k. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.35
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	4.858.599.266	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	4.858.599.266		
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	138.615.000	a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	138.615.000		
b	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	200.000.000	b	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	200.000.000		
3	Administrasi umum perangkat daerah							3	Administrasi umum perangkat daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.500.000	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.500.000	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	bulan	20.000.000	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	bulan	20.000.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	44.000.000	f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	76.000.000	Penambahan anggaran 32.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
g	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	55.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	85.000.000
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	
g	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	80.000000	Penam bahan anggar an 30.000 .000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	170.000.000	Penam bahan anggar an 85.000 .000
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000	
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	65.000.000	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	65.000.000	
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	bulan	7.500.000	b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	bulan	7.500.000	
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	172.174.000	c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	172.174.000	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	bulan	70.000.000	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	bulan	70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12	bulan	65.000.000
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Paket	5.000.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	30.000.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	125.000.000
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum					
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12	bulan	65.000.000	
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Paket	5.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	60.000.000	Penam bahan anggar an 30.000 .000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	125.000.000	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	bulan	120.883.400	a	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	bulan	120.883.400	
b	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	b	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000)	12	bulan	865.181.000	c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000)	12	bulan	865.181.000	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum			0	d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	dokumen		
e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab. Temanggung K	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	paket	339.000.000	e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab Temanggung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	paket	339.000.000	Sudah termasuk anggaran hasil musrenbang RKPD 229.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
f	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	12	bulan	30.000.000	f	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	12	bulan	30.000.000	
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	14.595.600	g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	14.595.600	
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						
a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	bulan	60.000.000	a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	bulan	60.000.000	
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	72.299.900	a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	156.499.900	Terdapat penambahan anggaran 84.200.000
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	59.000	b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	96.059.000	Terdapat Penambahan anggaran 96.000.000
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	59.000	c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	162.650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran	12	bulan	1.032.620.000	d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran	12	bulan	1.032.620.000	
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkun gan yang Dipersyaratka n Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	19.981.000	a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkun gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	29.667.000	anggr kuran g 9.686. 600 total anggr menja di 29.667 .000
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						
a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	1	paket	134.455.000	a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	1	paket	661.718.000	Penam bahan anggar an hasil Musre nbang RKPD

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1	Paket	45.564.000	b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	12	bulan	1.261.468.000	anggaran kurang 1.170.904.000 totalnya menjadi 1.216.468.000

Sumber : satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.36

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
(hasil Musrenbang RKPD Kecamatan)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngadirejo	Terlaksananya pelatihan kapasitas Satlinmas	109.000.000	
2	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pringsurat	Terlaksananya pelatihan kapasitas Satlinmas	120.000.000	
3	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Wonoboyo	- Terlaksananya pelatiha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Terlaksananya pengadaan APAR	100.000.000	

	masyarakat dalam pencegahan kebakaran				

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2019-2023 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- pelayanan kerugian materil; dan
- pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materiil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

- o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- o yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- o berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- o Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- o Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- o Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- o Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- o Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- o Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- o Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dikarenakan penerapan SPM belum masuk di dalam RPJMD 2018-2023 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

- c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota
Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK

dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan/sasaran yaitu **Indeks Rasa Aman**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yaitu **Temanggung makin maju, mandiri, aman adil dan sejahtera**

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target (Perangkat Daerah) Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas			Indeks Rasa Aman	angka	4,62	4,62
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat					
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang terlatih	%	3,46	3,46
			Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100
			Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	48	48

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

		Penyelamatan non Kebakaran				
			Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100
			Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	100	100
			Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	3,08	3,08

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.265.286.166	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.948.786.266	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.505.388.266	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.445.388.266	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.599.266	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.599.266	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599.266		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599.266	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.615.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.615.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.615.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.615.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	
	Pengadaan Mebel	30.000.000		Pengadaan Mebel	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.674.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.674.000.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.000.000	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	90.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	70.000.000	(20.000.000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000		Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	60.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000	(40.000.000)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	125.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	125.000.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.660.000	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.554.660.000	
a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.494.660.000	a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.494.660.000	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.883.400		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.883.400	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	940.181.000		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	940.181.000	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	1.000.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	339.000.000		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	339.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.595.600		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.595.600	
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	60.000.000	b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	60.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.205.237.900	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.148.738.000	
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.385.237.900	a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.328.738.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.499.900		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	(56.499.000)
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	96.059.000		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	96.059.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.059.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.059.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.032.620.000		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.032.620.000	
b	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.981.000	b	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.981.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.981.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.981.000	
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	780.019.000	c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	780.019.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	134.455.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	134.455.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	645.564.000		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	445.564.000	(200.000.000)
	JUMLAH	10.265.286.166		JUMLAH	10.948.786.266	683.500.100

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 683.500.100,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pengamanan Pilkada.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kab. Temanggung Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA								10.948.786 .266					
1 0 5 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.858.599. 266					
1 0 5 1	2.0 0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599. 266	DAU		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	
1 0 5 1	2.0 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								338.615.00 0					
1 0 5 1	2.0 0 1 5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	138.615.00 0	DAU		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
1 0 5 1	2.0 0 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				Kantor Satpol PP dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.00 0	DBHCH T		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

									Damkar Temanggung		Peraturan Perundang-Undangan									
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah															263.500.000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	DAU			Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	DAU			Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	DAU			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		2 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	20.000.000	DAU			Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan		1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	DAU			Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	76.000.000	DAU	Pagu awal : 44.000.000, usulan tambahan : 32.000.		Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu		12 Bulan	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

														000, jumlah akhir : 76.000. 000			
1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kantor Satpol PP dan Damkar Temang gung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	80.000.000	DAU	Pagu awal : 55.000. 000, usulan tamba han : 25.000. 000, jumlah akhir : 80.000. 000	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							455.000.00 0					
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temang gung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.00 0	DAU	Pagu awal : 85.000. 000, usulan tamba han : 85.000. 000, jumlah akhir : 170.00 0.000 (untuk pengad aan motor patrol 4 unit)	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel				Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	30.000.000	DAU		Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	1 Paket	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

1	0	0	2.0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	DAU	Pagu awal : 70.000.000, usulan tambahan : 20.000.000, jumlah akhir : 90.000.000 (untuk biaya STNK kendaraan Damkar)	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	DAU				12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	5.000.000	DAU		Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	1 Paket		
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	DAU	Pagu awal : 30.000.000, usulan tambahan : 30.000.000, jumlah akhir : 60.000.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit		

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	5	2	1	3	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				Satpol PP dan Damkar Temanggung		Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000) dan pengamanan Pilkades (75.000.000)	0		awal : 865.181.000, dapat tambahan untuk pengamanan Pilkades : 75.000.000, jumlah akhir : 940.181.000	Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000) dan pengamanan Pilkades (75.000.000)	Bulan	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung				1.000.000.000	DAU				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Satlinmas yang terlatih	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	339.000.000	DAU	Pagu awal : 110.000.000, dapat tambahan dari hasil Musrenbang 229.000.000 (kec Ngadirejo : 109.000.000 dan kec Pringsurat :	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	1 Paket	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

					Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
1	0	0	2.0	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	100.000.000	DAU	Pagu awal : 72.299.900, usulan tambahan : 84.200.000, jumlah akhir : 156.499.900 (untuk mencukupi BBM dan Oli)	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	12 Bulan
1	0	0	2.0	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	96.059.000	DAU	Pagu awal : 59.000, usulan tambahan : 100.000, jumlah akhir : 100.059.000 (untuk pengadaan peralatan Damkar)	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

1	0	0	2.0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang Mempe roleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Terpenuhinya Standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	100.059.000	DAU		Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tercukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan Kesehatan/ketenagakerjaan dll	1.032.620.000	DAU		Tercukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan Kesehatan/ketenagakerjaan dll	12 Bulan	
1	0	0	2.0		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								39.981.000					
1	0	0	2.0	0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	39.981.000	DAU	Pagu awal : 19.981.000, usulan tambahan : 20.000.000, jumlah akhir : 39.981.000 (untuk pengadaan alat ukur	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	12 Bulan	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

														hydrant)			
1	0	0	2.0		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												
	5	4	4														
1	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (tambahan hasil musrenbang Kec. Wonoboyo = Rp. 100.000.000,-)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran dan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	134.455.000	DAU	Pagu awal : 34.455.000, dapat tambahan dari hasil Musrenbang : 100.000.000 (kec wonoboyo : 100.000.000)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran dan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	1 Paket
1	0	0	2.0	0	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar	Terpenuhinya Sarpras Pendukung Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat / relawan damkar	445.564.000	DAU	Pagu awal : 45.564.000, usulan tambahan : 600.000.000, jumlah akhir : 645.564.000	Terpenuhinya Sarpras Pendukung Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat / relawan damkar	1 Paket

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 93 %, realisasi Belanja Modal sebesar 7 %, belanja Daerah sebesar 8.888.633.674, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 97,01 %,

realisasi Belanja Modal sebesar 2,99 %, belanja Daerah Sebesar 4.118.528.891

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 (Perangkat Daerah) mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 10.948.786.266,- yang terdiri dari 3 program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum , program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 199303 1 003